

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian terkait dengan perbandingan implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup dan Desa Mojorembun Kabupaten Blora dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup telah diimplementasikan dengan efektif, sedangkan Desa Mojorembun hingga saat ini belum berhasil memaksimalkan implementasi program Desa Anti Politik Uang. Dalam penelitian ini perbedaan implementasi di kedua desa tersebut dianalisis melalui beberapa dimensi penelitian yaitu kondisi sosial, ekonomi, dan politik; jarak dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora; komunikasi dan koordinasi; serta disposisi implementor.

Implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Tutup berlangsung dengan efektif karena adanya komunikasi, koordinasi, dan pendampingan yang lebih intensif. Dukungan tersebut semakin efektif karena adanya kedekatan sosial antara Desa Tutup dengan mantan Ketua Bawaslu Kabupaten Blora pada saat itu. Dalam proses pemberian pendidikan politik melalui sosialisasi Desa Tutup turut serta melibatkan para tokoh masyarakat, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Keterbukaan masyarakat dalam menerima program tersebut disebabkan oleh rata-rata pendidikan dan kestabilan ekonomi yang tinggi. Selain itu, adanya kekecewaan terhadap kepemimpinan sebelumnya yang lahir dari proses praktik politik uang juga menjadi motivasi masyarakat untuk

melaksanakan konsep dari program Desa Anti Politik Uang yang dapat diimplementasikan dengan baik dalam Pilkades Desa Tutup 2019.

Sebaliknya, dalam implementasi program Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun mengalami berbagai hambatan dalam proses koordinasi dan pendampingan oleh Bawaslu Kabupaten Blora karena adanya keterbatasan waktu, sumber daya, dan anggaran. Bawaslu Kabupaten Blora cenderung menyerahkan tanggung jawab secara penuh kepada Desa Mojorembun untuk melaksanakan program Desa Anti Politik Uang tanpa adanya koordinasi dan pendampingan secara berkala. Adanya intensitas pro kontra yang tinggi dalam masyarakat yang disebabkan oleh faktor pendidikan politik yang masih rendah dan kestabilan ekonomi yang masih kurang juga mempengaruhi keberhasilan program. Tidak sedikit masyarakat Desa Mojorembun yang menganggap bahwa politik uang merupakan momentum untuk mendapatkan uang secara percuma tanpa memikirkan dampak panjang terjadinya praktik politik uang. Selain itu, adanya fanatisme politik yang tinggi dalam segi keagamaan dan kedekatan sosial dalam masyarakat juga menghambat pengimplementasian program Desa Anti Politik Uang di Desa Mojorembun.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa pengimplementasian program Desa Anti Politik Uang di kedua desa tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun faktor eksternal. Pendeklarasian sebagai Desa Anti Politik Uang saja tidak cukup untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas tanpa adanya komitmen dari semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan yang

berbasis lokal dan terintegrasi di setiap desa untuk memastikan efektivitas program Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Blora.

4.2 Saran

Dalam upaya untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas melalui program Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Blora, penting bagi Bawaslu Kabupaten Blora untuk mempertimbangkan kondisi lokal suatu desa. Bawaslu Kabupaten Blora perlu memberikan perhatian khusus terutama dalam hal koordinasi dan pendampingan pada desa-desa yang terletak cukup jauh dari kantor Bawaslu Kabupaten Blora, seperti Desa Mojorembun. Adanya perhatian khusus tersebut diharapkan mampu mengantisipasi terjadinya hambatan-hambatan dalam implementasi program Desa Anti Politik Uang.

Selanjutnya, diperlukan adanya pendekatan yang bersifat kontekstual dan berbasis wilayah dalam pengimplementasian program Desa Anti Politik Uang. Setiap desa terutama di Kabupaten Blora memiliki karakteristik sosial, ekonomi dan politik yang berbeda-beda, sehingga diperlukan adanya penyesuaian program dengan kondisi masyarakat yang ada. Misalnya dalam desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang dan budaya politik yang kuat diperlukan pendekatan yang bersifat lebih personal serta berkelanjutan. Penguatan kapasitas aparatur pemerintah desa juga perlu diperhatikan untuk memastikan efektivitas pengimplementasian program Desa Anti Politik Uang.

Selain itu, untuk menjaga komitmen dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang masih mudah terpengaruh oleh adanya fanatisme dan budaya

praktik politik uang, Bawaslu Kabupaten Blora bersama pemerintah desa dan PKD perlu melibatkan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi. Sosialisasi yang personal dan intensif diperlukan untuk memberikan edukasi terkait bahaya politik uang dan manfaat terciptanya Pemilu yang berintegritas. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui upaya pengintegrasian dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada institusi. Dengan dilaksanakannya pendekatan yang lebih kontekstual dan holistik, serta memperkuat proses koordinasi dan pendampingan diharapkan program Desa Anti Politik Uang dapat diimplementasikan dengan efektif, sehingga mampu menciptakan Pemilu yang berintegritas.